

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki suatu kedaulatan akan wilayah, penduduk serta kedaulatan akan sistem keberlakuan hukum. Kedaulatan ini merupakan konsekuensi dari negara hukum yang dianut bangsa Indonesia

Sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Oleh sebab itu segala sesuatu yang merupakan tindakan baik itu oleh perseorangan maupun unsur publik harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tentu untuk menjalankan tata kehidupan sehari-hari harus menghormati dan menghargai hak-hak dasar orang lain. Penghargaan terhadap hak dasar tersebut tidak hanya ditujukan terhadap orang dewasa pada umumnya, tetapi juga terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

Ditinjau dari segi sosiologis, kedudukan anak sebagai subyek yang menjadi pusat perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam sikap tata kehidupan masyarakat Indonesia yang menempatkan kedudukan anak sebagai poros dan harapan generasi penerus bangsa. Maka oleh sebab itu dalam rangka pembentukan tumbuh

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kembang anak tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum secara maksimal oleh keluarga, masyarakat dan Negara.

Definisi yang dapat diberikan terkait anak banyak dijumpai di dalam beberapa pendapat ahli maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertama Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menetapkan batas usia pendewasaan yaitu 16 tahun. Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun.

Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Menurut Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pentingnya akan upaya perlindungan anak dalam tatanan Negara Hukum sangat penting dimana seorang anak selain merupakan generasi penerus juga diharapkan dapat menjadi bibit terbaik untuk mengubah masa depan bangsa. Oleh karena itu di dalam hukum positif Indonesia ketika

seorang anak terlibat dalam perkara hukum, penanganannya pun harus khusus, mengingat akan semangat perlindungan anak yang digerakkan oleh bangsa Indonesia.

Namun demikian masa anak-anak rawan akan terjadinya permasalahan terkait dengan berbagai tindakan yang melakukan pelanggaran hukum. Kondisi ini lebih dikarenakan adanya pengaruh lingkungan yang terdapat disekitarnya, jadi lingkungan yang lebih banyak mempengaruhi perilaku anak. Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak<sup>2</sup>.

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang. Baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta mencoba meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya.<sup>3</sup> sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan

---

<sup>2</sup>Andi Books. Pengertian Anak Secara Umum. <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>2017 diakses hari kamis tanggal 27 juli 2017

<sup>3</sup>Rumah kita 2010. Anak yang berkonflik dengan hukum. <http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/anak-yang-berkonflik-dengan-hukum/> diakses tanggal 1 juni 2017 jam 21.28

oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan hukum.

Proses peradilan anak bukan semata-mata untuk menjatuhkan sanksi kepada anak namun demikian lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku tindak kejahatan anak<sup>4</sup>. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan sedapat mungkin dihindarkan keterlibatan anak dalam proses peradilan anak. Untuk menghindari terjadinya dampak negatif peradilan bagi anak, maka aparat penegak hukum diberikan kebebasan untuk melakukan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses peradilan diluar peradilan pidana. Proses peralihan tersebut lebih dikenal dengan istilah diversifikasi dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan diversifikasi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>4</sup>Setya Wahyudi 2011. *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit Genta Publishing. hal. 1.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Pengertian Diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai Diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>5</sup>

Lebih jelasnya Diversi itu sendiri bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai penerapan diversi terhadap anak khususnya di Kota Malang terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Mengingat bahwa semakin berkembangnya teknologi yang tidak diimbangi oleh keseimbangan kesejahteraan antar masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya kejahatan yang melibatkan anak di Kota Malang.

---

<sup>5</sup>Pengertian Diversi secara umum. <http://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-diversi.html> di akses pada hari kamis tanggal 1 juni 2017

<sup>6</sup>Pasal 6 Bab II. “undang-undang No 11 Tahun 2012

Tetapi aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap anak untuk dilakukan diversi ternyata kurang memahami makna diversi itu sendiri. Penyidik Polresta Kota Malang bilamana menangani perkara yang melibatkan anak lebih banyak menggunakan mediasi penal daripada penyelesaian diversi, seperti misalnya apabila terjadi penyelesaian perkara, pihak kepolisian lebih memilih mempertemukan pelaku dan keluarga korban untuk bermusyawarah.

Oleh karena adanya permasalahan tersebut yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan diversi, maka lebih lanjut penulis akan membahas mengenai penerapan diversi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu contoh anak melakukan perbuatan hukum baru-baru ini di kota malang yaitu pada kasus penjambratan Handphone yang dilakukan oleh sekawan anak dibawah umur berjumlah 4 orang terhadap mahasiswi X yang sedang dibonceng dan bermain Handphone Merk Oppo waktu pukul 11.00 malam dan bisa ditangkap karena ditangkap oleh warga.

Contoh lain anak melakukan perbuatan hukum yaitu Pada kasus AQJ anak musisi tersohor Ahmad Dhani , kecelakaan dengan mengendarai Mobil Mitsubhisi Lancher B 80 SAL ,pada tahun 2015 silam yang menyebabkan meninggalnya 6 orang yaitu : Agus wahyudi, Riki aditia santosa Agus, Surahman ,Qomar dan Nurmansyah.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) , substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di Polresta Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Malang?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polresta Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dalam kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat di dalam pelaksanaan Diversi di kota Malang tepatnya di Polresta Malang Jl Jaksa Agung Suprpto No 19 kota Malang

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dalam kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan Ilmu Hukum.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Bagi Instansi



Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan terkait dalam implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dalam kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bagi Penulis

Dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan tentang implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dalam kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat terkait implementasi diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dalam kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penuli, maka penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* atau pendekatan lapangan. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai

beberapa masalah yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk segala gejala atau proses sosial. Dimana sisi yuridis untuk menganalisis Penerapan Diversi Terhadap Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengenai permasalahan hukumnya. Sedangkan pendekatan sosiologisnya adalah upaya kritis menjawab permasalahan-permasalahan dengan memandang kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan yaitu mengenai penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **2.Lokasi Penelitian**

Penulisan tugas akhir ini dilakukan di Polres Malang yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No 19 kota Malang. Dipilihnya lokasi ini dikarenakan bahwa Polres Malang yang menangani perkara pidana dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Kota Malang ternyata banyak menangani perkara-perkara yang terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu upaya untuk perlindungan anak melalui penerapan diveris berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin perlu untuk diimplementasikan dengan baik. Oleh karena pertimbangan tersebut, penulis melakukan penelitian di Polres Kota Malang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data Primer adalah jenis data yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara yang di dapat melalui proses interview/ wawancara pada pihak-pihak terkait serta dokumen yang diperoleh dari dokumen Polres Kota Malang

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak , Literatur, Jurnal , Internet , serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Interview / wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab dengan pihak yang terkait dan yang di anggap mengetahui pada permasalahan yang di angkat oleh penulis.

Interview / wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu :

1. Pihak kepolisian

Nama : Oktaviani sari

Kedudukan : staf di unit Perlindungan Anak dan Perempuan

Pangkat : BRIPDA

Nama : Kukuh ariwibowo S.H

Kedudukan : Staf di unit perlindungan Anak dan perempuan

Pangkat : BRIGADIR

Nama : Briptu Lutfi Nurhadinah

Kedudukan : penyidik

Pangkat : BRIPTU

b. Dokumentasi

Yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait . dalam hal ini Pihak Polres Malang memberikan arsip bahwa perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Malang di awal Tahun 2017 adalah;

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara
1	Persetubuhan terhadap anak	2
2	Kekerasan terhadap anak	2
3	Penelantaran terhadap anak	1

#### 4.1 Teknik pengumpulan data sekunder

Metode penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan cara

membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

#### **F. Metode analisis data**

Metode deskriptif analisis digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pengamatan dari praktek lapangan yang dilakukan oleh penulis dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis sehingga dapat dilakukan suatu analisis untuk menyusun pembahasan penelitian menjadi kesimpulan yang efektif dan efisien.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan tugas akhir ini sistematika yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang

memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang data penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan tugas akhir ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkannya berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.